

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan**

Konsep lain yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah pemberdayaan Masyarakat Kartasamita (1996) dalam Minarni, Utami & Prihatiningsih (1996) harus didukung dan dibuat “kuat” atau mandiri (2017,hlm.148). Sebagai hasil dari upaya ini, masyarakat didorong, diberi energi, dan dibangkitkan kesadarannya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, fasilitas, dan sumber daya sehingga mereka dapat tumbuh dan melindungi diri mereka sendiri. Dalam pengertian yang paling mendasar, perlindungan berarti membela mereka yang rentan terhadap mereka yang lebih berkuasa (Kuswandoro, 2016 dalam Minarni *et al.*,2017,hlm.148).

Pemberdayaan juga diartikan sebagai pemberian kekuatan/kemampuan. Artinya “Pemberian” memberikan sumber inisiatif bukan dari masyarakat melainkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau kemampuan. Sementara itu (Priyono dan Pranarka 1996 dalam Ambar Teguh 2004, hlm.78) bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, pertama adalah *to give power or authority*, kedua adalah *to give ability or enable*. Makna pengertian pertama yaitu memberikan kekuasaan atau mengalihkan kekuatan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan arti dari konsep kedua adalah Pemberdayaan atau Pemberdayaan dan memberi kesempatan.

###### **2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Pemberdayaan**

Menurut Anwas (2013,hlm.3) dalam Maduki, Loda, Luaylik, Fachrizi, Azizah, Firdaus, Imam, Ma'mun, Aidin, Matnin, Anggraini, Haryadi & Setiawan (2017,hlm.86) Upaya untuk memberdayakan individu dan membuat mereka mandiri, serta mandiri, adalah apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat. Membangun sesuatu, memberikan pelatihan keterampilan, membantu

orang lain hanyalah beberapa tindakan yang dapat digunakan untuk memberdayakan komunitas. Jenis pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun definisi menurut (Priyono 1996 dikutip oleh Dewi dan Dinata 2013, hlm.10 dalam Maduki *et al.*, 2017, hlm.86) Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan daya tawar masyarakat dari semua lapisan masyarakat dengan menumbuhkan pertumbuhan, kemandirian, dan kemandirian.

### **2.1.1.3 Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Mardikanto (2014, hlm.202) dalam Rahmadani, Raharjo & Resnawaty (2018, hlm.207) Berikut enam tujuan pemberdayaan masyarakat: (a) Peningkatan kelembagaan (*better institution*). Langkah korektif yang dilakukan diharapkan mengarah pada perbaikan kelembagaan, termasuk pembentukan jaringan usaha, sebagai akibat dari tindakan korektif yang dilakukan (b). Peningkatan dalam bisnis (bisnis yang lebih baik), dalam pendidikan (semangat belajar), dalam aksesibilitas ke bisnis, dalam aktivitas dan sistem, semuanya diantisipasi untuk meningkatkan bisnis yang berkelanjutan. (C). Diasumsikan bahwa pendapatan dia dan keluarganya dan masyarakat akan meningkat seiring dengan pendapatannya sendiri (lebih tinggi). (D). Peningkatan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan atau kurangnya pendapatan. (e). Kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat harus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, keamanan finansial, dan lingkungan.

### **2.1.1.4 Tahap - Tahap Pemberdayaan**

Menurut Soekanto (1987, hlm.63) dalam Maryani & Nainggolan (2019, hlm.13) Ada tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain :

#### **a. Tahap Persiapan**

Untuk sampai ke titik ini, ada dua hal yang harus dilakukan: pertama, petugas harus dilatih, dan kedua, masyarakat pekerja harus menyiapkan

lapangan. Personil yang diberdayakan masyarakat dapat melaksanakan pelatihan itu sendiri atau dapat di-*outsorce*. Pada dasarnya, dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk mendidik/tanpa ada paksaan (Soekanto 1987, hlm.63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm. 13).

Tahap persiapan dalam penelitian ini merupakan pengumpulan dan pemrosesan data didahului oleh berbagai operasi persiapan. Penjadwalan tugas-tugas penting sangat penting pada saat ini untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas.

#### **b. Tahapan Pengkajian (*Assesment*)**

Individu atau kelompok masyarakat mungkin melakukan penilaian pada saat ini. Dalam skenario ini, proses ditujukan untuk menentukan kebutuhan yang dirasakan klien dan sumber daya yang mereka miliki untuk mengatasinya (Soekanto 1987, hlm. 63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm.13).

Tahap pengkajian dalam penelitian ini merupakan proses pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber untuk dilakukan evaluasi agar dapat diketahui apa yang harus ditingkatkan / diperbaiki.

#### **c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan**

Selama ini, pejabat akan bertindak sebagai agen perubahan, mendorong warga untuk menjadi peserta aktif dalam proses pemecahan masalah (Soekanto 1987, hlm. 63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm. 13).

Pada tahap ini perencanaan dalam penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam kegiatan yang akan dilakukan.

#### **d. Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi**

Selama fase inilah agen perubahan (*exchange agent*) membantu setiap kelompok dalam mengembangkan strategi mereka sendiri untuk menangani isu-isu terkini. Selain itu, pihak berwenang membantu menuangkan pemikiran mereka ke dalam tulisan, terutama saat membuat proposal kepada penyandang dana (Soekanto 1987, hlm.63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm.13).

Pada tahap pemformalisasi rencana aksi dalam penelitian ini untuk meningkatkan penghasilan masyarakat yang rendah sehingga dapat memiliki penghasilan yang mencukupi.

#### **e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program Atau Kegiatan**

Program-program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat diharapkan memiliki dampak jangka panjang jika anggota masyarakat mengambil peran kepemimpinan. Pada tahap ini, pejabat dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa rencana yang mereka buat sejalan dengan kenyataan di lapangan (Soekanto 1987, hlm. 63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm. 14).

Pada tahap pelaksanaan dalam penelitian ini penulis melakukan observasi mengenai keberlangsungan program yang dilaksanakan oleh KWT Mekarsari dan memastikan bahwa KWT Mekarsari melakukan kegiatan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

#### **f. Tahap Evaluasi**

Warga harus dilibatkan dalam proses evaluasi sebagai cara untuk mengawasi kelanjutan program dan pejabat pemberdayaan masyarakat. Sistem komunitas yang dipantau secara internal umumnya dapat dibangun dengan cepat dengan kerjasama warga, dan komunikasi komunitas yang lebih matang dapat dibangun dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam jangka panjang menggunakan sumber daya yang ada (Soekanto 1987, hlm, 63 dalam Maryani & Nainggolan 2019, hlm.14).

Pada tahap evaluasi dalam penelitian ini penulis menilai apakah perencanaan kegiatan atau program yang dilaksanakan di KWT Mekarsari sesuai dengan perencanaan yang diharapkan ataupun tidak. Karena dalam tahap evaluasi ini penulis melakukan perbandingan hasil akhir dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang wajib untuk dicapai.

#### **g. Tahap Terminasi**

Agar komunitas dapat berinteraksi, proyek harus berakhir selama fase penghentian ini dan semua ikatan resmi dengan komunitas target terputus

dengan sementara (Soekanto 1987,hlm.63 dalam Maryani & Nainggolan 2019,hlm.14).

Pada tahapan terminasi dalam penelitian ini penulis melakukan prosedur harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan tahap ini merupakan salah satu langkah terakhir sebelum komunitas dapat dianggap sebagai komunitas mandiri.

#### **2.1.1.5 Strategi Pemberdayaan**

Suharto (1997) dalam Handini, Sukesu & Astuti (2019,hlm.77) Selain pelatihan dan kampanye bagi masyarakat kurang mampu, ia mencatat bahwa ada banyak bagian penting dari pemberdayaan masyarakat, seperti:

##### **a. Motivasi**

Memahami hak seseorang sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat membantu mengajarkan keluarga miskin tentang pentingnya solidaritas, hubungan sosial, dan kekuasaan. Sebagai alat kelembagaan kunci untuk mengkoordinasikan dan melakukan inisiatif pengembangan masyarakat di desa atau jalan, membantu rumah tangga miskin membuat kelompok. Orang-orang ini terpaksa beralih ke wirausaha untuk melengkapi sumber daya keuangan mereka yang sedikit.

##### **b. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan**

Pendidikan dasar, inisiatif imunisasi, dan kebersihan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Keterampilan kejuruan juga dapat diajarkan dengan cara yang lebih langsung. Pengetahuan eksternal dapat digunakan bersama dengan pengetahuan lokal, yang seringkali diperoleh melalui pengalaman langsung. Pelatihan semacam ini dapat membantu orang-orang termiskin di dunia mencari pekerjaan di luar wilayah mereka sendiri, atau membantu mereka mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukannya.

##### **c. Manajemen Diri**

Kemampuan kelompok untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan mengkoordinasikan operasi mereka sendiri, seperti mengadakan pertemuan,

mencatat dan melaporkan, mengoperasikan simpan pinjam, menyelesaikan konflik, dan mengelola kepemilikan komunitas, sangat penting. Bantuan eksternal dapat berguna pada fase awal pengembangan sistem. Sistem kemudian dapat diimplementasikan dan dikelola oleh kelompok ini, yang akan diberikan kendali penuh atasnya.

#### **d. Mobilisasi Sumber**

Dengan tujuan membangun modal sosial, ini merupakan sarana untuk mengumpulkan sumber daya pribadi melalui tabungan rutin dan kontribusi sukarela. Setiap orang memiliki sumber daya unik mereka sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar, menurut konsep ini. Konstruksi sistem untuk pengumpulan, alokasi, dan penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang tersedia bagi mereka. Akibatnya, kepemilikan dan manajemen jangka panjang terjamin.

#### **e. Pembangunan Dan Pengembangan Jaringan**

Agar organisasi nirlaba berkembang, anggotanya harus lebih mampu terhubung dengan berbagai sistem sosial di sekitar mereka. Dengan jaringan ini, kami dapat membantu memberikan sumber daya dan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu.

Dimungkinkan untuk mengejar 5P pemberdayaan, yang dapat disederhanakan menjadi 5P, dengan lima inisiatif untuk masyarakat miskin: Pemukiman, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto,1997, hlm.218-219 dalam Handini *et al.*,2019,hlm.79) :

##### 1). Pemungkinan

Ciptakan lingkungan di mana potensi masyarakat kurang mampu dapat terwujud sepenuhnya. Menghilangkan kendala budaya dan struktural adalah langkah pertama untuk memberdayakan masyarakat miskin.

##### 2). Penguatan

Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menghadapi kesulitan dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menyediakan lebih banyak informasi dan sumber daya. Harus ada cara untuk

mengembangkan semua kemampuan dan kepercayaan diri seseorang agar mereka menjadi mandiri.

3). Perlindungan

Menghindari persaingan yang tidak seimbang (terutama yang tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat dengan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Diskriminasi dan penindasan terhadap kaum miskin harus diberantas sebagai bagian dari proses pemberdayaan.

4). Penyokongan

Membantu dan membimbing mereka yang berjuang untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam hidup. Agar masyarakat miskin tidak semakin terpinggirkan, pemberdayaan harus mampu mendukung mereka.

5). Pemeliharaan

Mencapai kondisi terbaik untuk alokasi kekuasaan yang adil dalam masyarakat. Pemberdayaan harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan bisnis, memastikan bahwa ada harmoni dan keseimbangan.

Oleh karena itu dalam pemberdayaan khususnya pada wanita di KWT Mekarsari diperlukan adanya upaya yang terencana yang berkelanjutan sebagai rangka dalam meningkatkan kondisi (kualitas hidup) dan posisi (kedudukan dan peran) pemberdayaan Masyarakat di KWT Mekarsari berdasarkan hal tersebut, masih perlu dan harus ditingkatkan. Secara konteks kebijakan, pemerintah telah menjamin mutu kehidupan secara adil baik pada perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan pada masyarakat terutama wanita tani akan meningkatkan kualitas peranan wanita tani dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender melalui *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dijalankan pada september tahun 2000, dan pada tahun 2015 program tersebut difokuskan untuk tujuan yang akan dicapai. Tujuan MDGs ini harus mampu dicapai indonesia yang terdiri atas delapan aspek, yang salah satunya adalah: Penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Karena itu patut digaris bawahi bahwa

MDGs bukanlah merupakan strategi mewujudkan kualitas hidup, tetapi lebih daftar apa yang perlu dicapai. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) disusun sebagai bagian dari kerangka/agenda pembangunan pasca-2015 untuk menjaga momentum menuju Tujuan Pembangunan Milenium (SDGs). Sebagai pengganti Tujuan Pembangunan Milenium 2015, konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat penting (Akhir, D. J., 2015 dalam Wahyuningsih, 2017, hlm.391).

MDGs dan SDGs secara umum memiliki banyak kesamaan. SDGs melanjutkan tujuan mulia Tujuan Pembangunan Milenium, yang berfokus pada penghapusan kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia. Namun pada tahun 2015, kesepakatan yang ditandatangani oleh para pemimpin dunia pada tahun 2000 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ada konsensus yang berkembang di antara para pemimpin dunia bahwa Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) harus didorong ke depan, yang mengarah pada pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ini adalah tantangan global yang paling signifikan, dan mengatasinya merupakan prasyarat yang tidak dapat dipenuhi jika pembangunan berkelanjutan ingin dicapai (Bappenas, 2015).

Menurut Suharto (2009, hlm 58), Orang-orang, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang kurang beruntung.

- a. Mereka harus diberi makan, dididik, dan dibebaskan dari penderitaan fisik dan emosional mereka.
- b. Akses ke sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang dan jasa yang mereka inginkan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang akan mempengaruhi mereka.

Karwati (2017, hlm.45) menjelaskan bahwa memungkinkan masyarakat untuk lebih memenuhi tuntutan penghuninya dalam hal kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih baik adalah salah satu tujuan dari forum Pemberdayaan. Menurut Kartasasmita (1997) dalam Oja & Tambajong (2018, hlm.2) Ketika kami menggunakan istilah "pemberdayaan" dalam konteks sosial, yang kami

maksudkan adalah kemampuan individu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan tingkat pemberdayaan mereka sendiri. Dengan bantuan pemerintah, semakin banyak perempuan yang terlibat di sektor pertanian, yang mendorong upaya pemberdayaan perempuan dan membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan dan pendapatan, serta meningkatkan status mereka.

Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah nama programnya (KRPL). Tujuan program ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan, yaitu pertanian pekarangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh Rumah Pangan Berkelanjutan (RPL), KRPL adalah kawasan di mana sebuah keluarga telah mengembangkan pekarangan yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan pasokan pangan di suatu wilayah (RT, RW, dusun, desa, jalan, dll). kebutuhan gizi, meningkatkan kesejahteraan keluarga (Pemiliana,2015,hlm.1).

Bagi manusia, makanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk menopang kehidupan dan kehidupan Karsin (2004) dalam Sasana & Dul Muid (2018,hlm.265). Maka dari itu perlu diadakannya pemberdayaan bagi masyarakat khususnya perempuan penggiat kelompok wanita tani sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

### **2.1.2 Pengertian Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Nuryanti dan Swastika (2011) dalam Pangestika, Hohary, Suprihati, Agua, Widyawati, Herawati, Sutrisno, Handoko, Simamora, Zebua, Nadapdap, Prihtanti, Yuliawati, Nuswantara & Maria (2020,hlm.160) menyatakan bahwa kelompok tani merupakan sekelompok petani yang dapat mengkonsolidasi melalui kepentingan bersama dalam berusaha tani. Organisasi kelompok wanita tani Bersifat informal namun mungkin efektif karena kesadaran bersama dan ide-ide yang sama yang mendasarinya. Biasanya, kelompok tani terdiri dari antara 20 dan 40 anggota, dan ketua, sekretaris, dan bendahara semuanya adalah posisi terpilih.

Kelompok Wanita Tani memiliki posko sekretariat guna memudahkan para anggota berkumpul saling bertukar pikiran, mengenai usaha tani mereka dalam mewujudkan ketahanan pangan dan juga mereka membentuk kebun bibit di area

lahan pekarangan untuk menumbuhkan bibit dari berbagai jenis sayuran, umbi-umbian dan juga buah-buahan.

#### **2.1.2.1 Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Menurut Vera Nur Fatmawati (2018) dalam Napitulu, Putra & Shalahuddin (2019, hlm. 62) Sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan kegiatan pengolahan hasil pertanian, kerja Kelompok Wanita Tani menjadi contoh bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan dengan lebih baik. Tidak mungkin memisahkan operasi organisasi perempuan tani dari partisipasi anggotanya.

#### **2.1.2.2 Tujuan Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Inilah yang diharapkan oleh kelompok untuk dicapai bersama. Fokus utama komponen penetapan tujuan adalah tujuan kelompok yang disepakati. Pemimpin kelompok tani mengomunikasikan tujuan kelompok kepada anggotanya agar setiap orang yang terlibat dalam kelompok sadar dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Andarwati, Guntoro, Haryadi & Sulastri (2012, hlm. 43) bahwa pencapaian tujuan kelompok dan rasa bangga di antara anggota yang telah melakukannya menunjukkan betapa pentingnya menempatkan efektivitas kelompok. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pada tantangan bersama, dengan tujuan memecahkannya sehingga kelompok dapat mencapai hasil yang diinginkan, yang dibagikan oleh semua anggota.

#### **2.1.3 Konsep (M-KRPL)**

Budaya langka negara ini yang membudidayakan berbagai macam sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan tanaman obat, serta memelihara ternak dan menggunakan pekarangan sebagai sumber makanan, dimasukkan ke Kementerian Pertanian melalui Pusat Penelitian Teknologi Pertanian M-KRPL. Konsep Rumah Pangan Berkelanjutan kemudian dibentuk agar berdampak lebih luas dalam rangka swasembada pangan agar berdampak lebih besar pada keberlangsungan KRPL.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan KRPL ini harus dilakukan secara partisipatif (oleh, untuk, atau bersama masyarakat), kemudian ditelaah secara kreatif dan kritis baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui penggerakan/penyuluh tanah.

Pembentukan kawasan *food house* juga diharapkan dapat berlanjut secara berkelanjutan jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dan perbaikan. Inilah yang diperoleh konsep KRPL ketika istilah "berkelanjutan" dilekatkan. Selanjutnya, ketersediaan dan pasokan benih/benih merupakan aspek penting dalam mempertahankan dan memastikan keberlanjutan perumahan pangan. Dalam model KRPL, pembibitan merupakan salah satu elemen penting. Ada cukup pembibitan di sebuah distrik untuk memenuhi kebutuhan semua orang, dan mereka dijalankan secara kooperatif oleh orang-orang yang tinggal di sana.

Untuk menjalankan KRPL, Pusat Penelitian Teknologi Pertanian di setiap provinsi Indonesia bekerja dengan Balitbangtan untuk membangun program percontohan (model) dan sumber daya pengajaran untuk organisasi masyarakat lokal (2016). Percontohan awal disebut sebagai (M-KRPL). Salah satu tujuan KRPL M-primer adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan bergizi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk memenuhi komponen "Penyediaan Pangan dan Sumber Gizi", akan dilakukan pengadaan fisik media tanam, pupuk/pakan, air dan benih, serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan bagi tanaman dan hewan. Aspek "Sustainable Supply" akan dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan melalui pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat; dan 2) pembentukan dan pengelolaan pembibitan desa/pembibitan kolektif (KBD/KBK) (Litbang Kementerian Pertanian, 2017 dalam Patadungan, 2019, hlm.106).

Pelaksanaannya M-KRPL memiliki lima prinsip dasar dalam KRPL (Patadungan, 2019, hlm.106) yaitu :

1. Menggunakan pekarangan ramah lingkungan untuk ketahanan pangan dan swasembada adalah langkah awal yang baik.
2. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.

3. Konservasi sumber daya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan).
4. Pembibitan Desa/Kelompok Pembibitan (KBD/KBK) membantu memastikan kelangsungan jangka panjangnya dengan menyediakan lingkungan pengasuhan bagi anak-anak.
5. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lokal.

#### **2.1.3.1 Pembentukan Kelompok**

Sherif (1962) dan Ahmadi (1991) dalam Ristianti & Fathurrohman (2020,hlm.22) Sebagai unit sosial, kelompok terdiri dari dua atau lebih individu yang berpartisipasi dalam kontak sosial yang sering dan sering, sehingga anggota kelompok telah menetapkan peran, tanggung jawab, dan konvensi yang unik untuk kelompok akandijumpai persepsi, adanya kebutuhan pada setiap individu, interaksi dan sosialisasi. Dengan demikian, kelompok terbentuk karena adanya interaksi yang diarahkan pada tujuan kelompok.

#### **2.1.3.2 Sosialisasi**

Goslin (1969,hlm.2) dalam Ihromi (1999,hlm.30) mengemukakan, sosialisasi adalah suatu proses dalam belajar Agar dapat berfungsi dalam masyarakat sebagai anggota kelompok, diasumsikan bahwa seorang individu akan memperoleh informasi, keterampilan, nilai, dan norma yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya itu untuk bersosialisasi. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dapat tumbuh sebagai hasil dari berinteraksi dengan orang lain secara alami atau melalui proses sosialisasi formal..

Sebagai bagian dari strategi tindak lanjut, kegiatan sosialisasi kelompok di sini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada para peserta. Menyelenggarakan acara sosialisasi berbasis lapangan untuk kelompok sasaran. Pertemuan dengan anggota lain dari organisasi berfungsi sebagai forum untuk pertukaran ide dan permintaan umpan balik.

#### **2.1.3.3 Penguatan Kelembagaan Kelompok**

Kelompok tani dan kerangka kelembagaan yang ada, yang menjalankan dan mengemban tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, merupakan

aspek penting dalam keberhasilan dan pembangunan pertanian di suatu daerah (BKP, 2010). Untuk mengubah struktur ekonomi daerah pedesaan, institusi berfungsi sebagai platform untuk mendorong tindakan kolektif di tingkat lokal (transformasi mata pencaharian menjadi ekonomi industri). Kinerja kelembagaan juga dianggap sebagai kemampuan organisasi untuk berhasil memanfaatkan sumber dayanya dan memberikan output yang selaras dengan tujuan serta tuntutan pengguna, menurut Syahyuti (2003).

#### **2.1.3.4 Tujuan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari**

Swasembada pangan menjadi semakin sulit karena populasi global yang terus meningkat dan basis lahan pertanian yang menyusut. Orang Indonesia dapat menanam makanan mereka sendiri di halaman belakang dan ruang kecil lainnya. Melalui BPTP, Wiratno menjabarkan tujuan-M, KRPL yang meliputi:

1. Dengan memaksimalkan pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan, keluarga dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya.
2. membantu rumah tangga dan masyarakat memanfaatkan pekarangan perkotaan dan pedesaan dengan lebih baik untuk menanam tanaman pangan (buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah), memelihara hewan, dan ikan untuk diversifikasi pangan.
3. Lindungi dan lestarikan tanaman pangan pekarangan dengan mendirikan bank benih.
4. Rancang sendiri suasana hijau dan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Anda.

#### **2.1.3.5 Objek Model Kawasan Rumah Pangan Lestari**

Sebagai langkah awal, Model Kawasan Rumah Pangan Lestari menjadi ajang uji coba regulasi langsung KRPL BPTP (2016), Objek (MKRPL) adalah suatu program dalam pemanfaatan pekarangan rumah secara intensif yang diterakan pada rumah dengan luas pekarangan yang sempit, sedang maupun luas. Untuk mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan, pekarangan harus memiliki kemampuan untuk memproduksi aneka jenis pangan.

Ada banyak nama lain untuk pekarangan, seperti toko kehidupan, apotek hidup, dan bahkan kata "halaman" itu sendiri. Diversifikasi sumber makanan dimungkinkan karena jumlah kecil dari berbagai tanaman yang biasa ditanam di halaman belakang. Halaman dipenuhi dengan berbagai macam tanaman sayuran, yang masing-masing memiliki tujuan ganda manfaat ekonomi dan daya tarik estetika.

#### **2.1.3.6 Penerapan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Susanti & Tawuran (2016,hlm.2) menjelaskan bahwa rumah tangga berdasarkan prinsip pekarangan ramah lingkungan Model Regional Rumah Pangan Lestari adalah kumpulan Rumah Pangan Lestari (RPL), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga, diversifikasi pangan lokal, melestarikan tanaman pangan untuk masa depan, dan meningkatkan penghasilan. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan akan diuntungkan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balibangtan) telah dipercaya membangun Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di seluruh provinsi di Indonesia untuk mempercepat implementasi KRPL. Sehingga peningkatan persepsi kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan melalui peningkatan peran kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan dukungan pemerintah terhadap peningkatan faktor peran kelompok.

Dukungan pemerintah termasuk lembaga penyuluhan terhadap peran kelompok yaitu peningkatan peran kelompok sebagai kelas belajar mengajar dan wahana kerja sama. Peningkatan peran kelompok perempuan dalam pemanfaatan pekarangan sebagai kelas belajar, memerlukan informasi yang memadai yakni materi penyuluhan pertanian yang berkaitan dengan penguatan kelompok sebagai kelas belajar.

#### **2.1.3.7 Implementasi Keberhasilan Model KRPL**

Hasbullah (2006) dalam Haridison (2013,hlm.41) memaparkan bahwa Tumbuhnya organisasi masyarakat akan dibantu oleh perluasan jaringan modal sosial yang memudahkan penyebaran ide dan informasi baru. Semua fitur dan dimensi aktivitas kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan sebagai hasilnya.

Demikian juga halnya dengan Implementasi keberhasilan program M-KRPL akan berhasil apabila masyarakat mampu bekerja keras, memotivasi, sehingga dapat menumbuhkan daya kreasi bergotong royong dalam Mencegah kegagalan teknologi pertanian dan mendukung keberlanjutan jangka panjang pembangunan pertanian masa depan dengan memastikan keberhasilan penggunaannya.

#### **2.1.4 Konsep Ketahanan Pangan**

Istilah “ketahanan pangan” dapat diartikan sebagai penilaian terhadap situasi pangan pada beberapa tingkatan, antara lain tingkat global, nasional, regional, dan individu Soehardjo (1996) dalam Rachman dan Arini (2002,hlm.15) istilah Ketahanan pangan global negara, wilayah, kelompok lokal, keluarga, dan masyarakat, bagaimanapun, adalah serangkaian hierarki, menurut Simatupang (1999). Ketahanan pangan individu tidak dapat dijamin hanya dengan menjamin ketahanan pangan rumah tangga seseorang. Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi kesehatan anggota rumah tangga, distribusi pangan, dan kebersihan lingkungan setempat.

##### **2.1.4.1 Pengertian Ketahanan Pangan**

Keputusan No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “pemuahan kebutuhan pangan rumah tangga, yang dibuktikan dengan tersedianya pangan yang layak dalam jumlah dan mutu, aman, merata, dan terjangkau” di Indonesia. Menurut definisi ketahanan pangan Maxwell dan Frankenberger (1992) dan Bank Dunia (1986), istilah "ketahanan pangan" dapat didefinisikan dalam berbagai cara Haryono *et al.* (2020, hlm.1). Semua orang yang memiliki akses ke makanan yang cukup setiap saat untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif adalah apa yang Bank Dunia (1996) Haryono *et al.* (2020, hlm.2) menyebut "ketahanan pangan".

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, undang-undang ini melangkah lebih maju dalam konsep ketahanan pangan. Penyediaan pangan negara bagi warga negara tercermin dari jumlah dan kualitas pangan yang cukup, sehingga ketahanan pangan melampaui tingkat rumah tangga. Untuk mempertahankan gaya hidup sehat, aktif, dan produktif yang

sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial seseorang, seseorang membutuhkan akses ke makanan yang aman, beragam, bergizi, adil, dan harga terjangkau (Haryono *et al.*,2020,hlm.4).

#### **2.1.4.2 Program Ketahanan Pangan**

Program Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjadi masyarakat/petani mandiri, memanfaatkan sumber daya lokal, dan mengembangkan inisiatif yang meningkatkan produksi pangan, menjaga kecukupan pasokan pangan, menjamin keamanan pangan, dan memprediksi kemiskinan pangan Darwanto (2005,hlm.152). Peran KRPL dalam mendukung program ketahanan pangan sangat besar. Oleh sebab itu penanganan dan pengelolaan Kawasan Rumah Pangan Lestari dalam mendukung program ketahanan pangan harus lebih diperhatikan agar dapat dimanfaatkan secara optimum dengan tetap menjaga kelestariannya.

Dalam upaya pelestarian ketahanan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, pemerintah Langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk beralih dari pendekatan nasional ke pendekatan individu untuk ketahanan pangan. Penyediaan pangan ditingkat perseorangan sebagai paradigma baru ketahanan pangan berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2012 lebih tepat dari pada paradigma lama dalam Undang-Undang Pangan sebelumnya karena secara teoritis terhindar dari kerawanan pangan di tingkat perorangan, Manaf (2018,hlm.221). Meskipun pemerintah mengeluarkan dua kebijakan kepala rumah tangga bertanggung jawab menyediakan makanan untuk keluarga, sedangkan pemerintah harus fokus menyediakan makanan untuk individu.

#### **2.1.4.3 Tujuan Ketahanan Pangan**

Tujuan program ketahanan pangan menurut Haryanto (2014) dalam Haryono *et al.*, (2020,hlm.9) adalah sebagai jaminan atas hak pangan, pembentukan menjadi basis sumber daya manusia berkualitas kemudian sebagai pilar ketahanan nasional. Tujuan ketahanan pangan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang, di mana pun mereka tinggal, memiliki akses terhadap pasokan pangan yang cukup bergizi, aman, dan berkualitas tinggi. Dalam amanat

Undang-Undang No 07 tahun 1996 terdapat pula penjelasan mengenai tujuan ketahanan pangan di Indonesia yaitu :

1. Ketersediaan pangan dalam arti luas mengacu pada tercapainya ketersediaan pangan yang cukup. Menggabungkan makanan yang berasal dari tumbuhan serta hewan atau ikan untuk memenuhi persyaratan diet karbohidrat; protein; lemak; vitamin; mineral; dan turunannya.
2. Tidak ada pantangan agama terhadap jenis makanan yang diberikan, selama disajikan di lingkungan yang sehat tanpa bahan biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan atau mengancam kesehatan manusia.
3. Memiliki makanan yang tersedia setiap saat dan di semua bagian negara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sana.
4. Keterjangkauan berarti bahwa keluarga memiliki akses sederhana ke makanan dengan harga yang mereka mampu.

Dengan demikian, apabila telah dilaksanakannya beberapa tujuan yang telah dijelaskan diharapkan masyarakat lebih menyadari pentingnya memperoleh ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

#### **2.1.4.4 Penyelenggaraan Kegiatan Ketahanan Pangan**

Manaf (2018,hlm.219) dalam bukunya menjelaskan UU RI Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan antara lain bahwa sistem pangan nasional tidak didefinisikan, tetapi dapat dipahami dari penjelasan umum, bahwa sistem pangan perlu diselenggarakan untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang memproduksi dan yang mengkonsumsi pangan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan secara vertikal karena memperlihatkan pemerintah mengatur, membina, dan mengawasi subsistem konsumsi pangan, serta subsistem produksi, pengadaan, dan peredaran.

## **2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Sejumlah penelitian sebelumnya dirangkum dalam bagian ini, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, KRPL, dan ketahanan pangan. Berikut ini adalah contoh penelitian sebelumnya:

A. Judul Penelitian :

*“Empowerment Of Women Farmer Groups Through Optimization Of Garden Utilization With Organic Vegetables In Low Land Based On Local And Sustainable (Minarni et al.,2017)”*.

Metode Analisis :

Pendampingan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Ini adalah metode untuk mengembangkan kebijakan dan program di pedesaan dengan melibatkan masyarakat lokal secara efektif, (Chambers,1994).

Hasil Penelitian :

1. Memiliki sekelompok orang yang berkompeten mengelola lingkungan sebagai khalayak sasaran.
2. Pastikan bahwa tindakan kelompok diawasi oleh audiens tertentu.
3. Ada audiens yang mampu dan mahir dalam mencapai hasil pemasaran.

B. Judul Penelitian :

*“Peranan KWT Manunggal Karya dalam upaya Pemberdayaan Perempuan Dusun Kleben, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Marthalita,2019)”*.

Metode Analisis :

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif investigasi. Upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia dikaji melalui lensa KWT Manunggal Karya (Organisasi Perempuan Tani).

Hasil Penelitian :

1. Tumbuhnya kesadaran perempuan untuk membantu pemerintah dalam usaha mengurangi jumlah angka kemiskinan dengan menekankan adanya pengangguran.
2. Tumbuhnya keinginan perempuan mandiri untuk mengisi kekosongan dengan adanya kegiatan yang unggul sehingga dapat mengembangkan dan menambah nilai keterampilan.

C. Judul Penelitian :

*“Keberhasilan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Gianyar (Sugitarina, Darmawan & Astiti,2016)”*.

Metode Analisis :

Perspektif petani terhadap program KRPL akan digali melalui desain penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian :

1. Usia seseorang, pendidikan, pekerjaan sampingan, luas pekarangan, pendidikan nonformal, dan jumlah anggota keluarga menjadi pertimbangan dalam menentukan status sosial ekonominya.
2. Karakteristik status sosial dan ekonomi petani. Perilaku petani dapat dibedakan dalam beberapa keadaan dengan sifat-sifat ini.

D. Judul Penelitian :

*“Tingkat Partisipasi anggota Dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rohmatulloh, Rochdiani & Sudrajat,2020)”*.

Metode Analisis :

Dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan mengambil kasus pada Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mekar wangi” di Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Hasil Penelitian :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam menikmati hasil
4. Partisipasi dalam evaluasi

E. Judul Penelitian

*“Peran Perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap sumbangan ekonomi keluarga (Wulan Mustika, 2016)”*.

Metode Analisis :

Penelitian dilakukan di Kota Cimahi dan menggunakan metode kualitatif dan data kualitatif untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil meningkatkan kontribusi perempuan dalam perekonomian rumah tangga

Hasil Penelitian :

Menetapkan bahwa peran perempuan dalam program PEKKA berdampak pada kontribusi uang untuk kebutuhan keluarga

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah karena penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dan dengan populasi yang berbeda. Desa Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, tempat penelitian ini dilakukan.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kelompok Wanita Tani Mekarsari berada di Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dengan demikian adanya perkumpulan KWT Mekarsari di daerah tersebut tentu akan menjadi salah satu program kegiatan mengelola hasil tani, untuk meningkatkan produktivitas melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan.

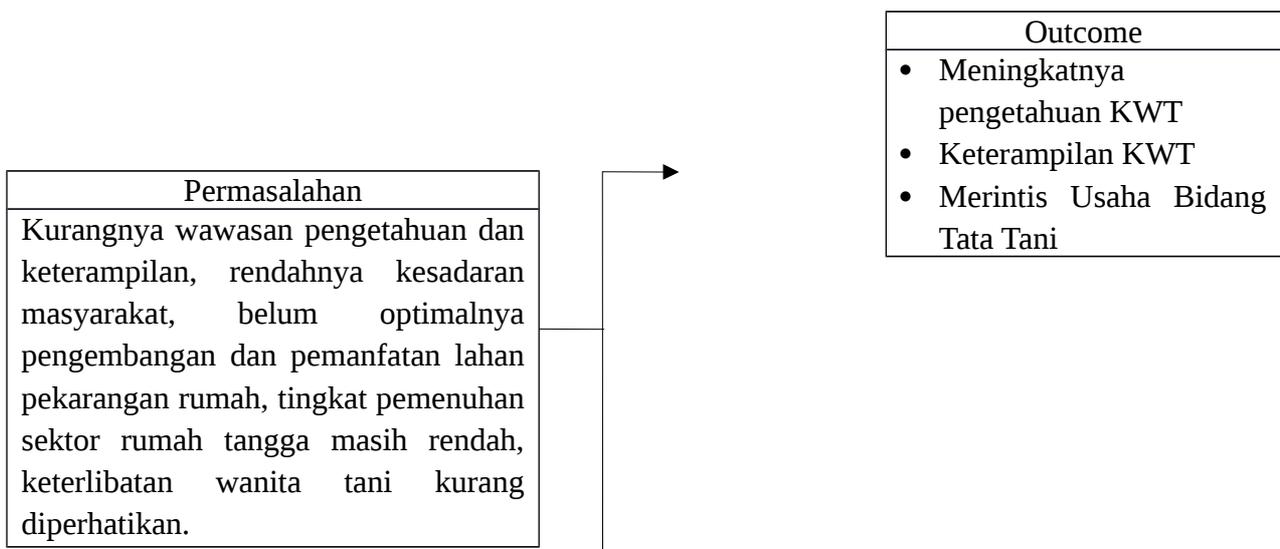
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia bekerja sama untuk menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Secara biologis, manusia adalah makhluk sosial yang mengandalkan satu sama lain dan alam. Semua pembangunan berkelanjutan bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan untuk fondasinya, yang penting untuk memasok manusia dengan makanan, energi, air, dan kebutuhan hidup lainnya (Damanik,2019,hlm.1).

Dengan adanya interaksi antara SDA dan manusia, akan membentuk suatu kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi sehingga proses yang dimaksud dapat menghasilkan kepentingan untuk mengembangkan tujuan KWT Mekarsari dengan andil dari masyarakat dan peran penyuluh melalui kegiatan KRPL yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Sebuah kegiatan memerlukan komponen sebagai pendukung untuk keberlangsungan atas tujuan pemberdayaan yang sudah

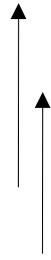
disepakati dalam kelompok, adapun komponen yang digunakan oleh KWT Meliputi :

1. Narasumber yang menjadi sebuah kedudukan penting dalam sebuah pencarian informasi atau data-data yang dibutuhkan.
2. Adanya KWT sebagai wadah dalam pembentukan struktur kepengurusan dan anggota.
3. Materi yang menjadi dasar ilmu pembelajaran anggota dan pengurus KWT Mekarsari untuk peningkatan khasanah keilmuan.
4. Teknik yang akan digunakan dalam upaya penyampaian materi.
5. Metode sebagai sebuah interpretasi dari pembinaan dan pendampingan.
6. Tujuan sebagai bentuk alternatif yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.
7. Evaluasi sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atas pemenuhan sebuah tujuan dari KWT Mekarsari.

Penentuan komponen memiliki peran yang sangat penting atas kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan sehingga kelompok KWT Mekarsari dan masyarakat akan mampu meningkatkan pengetahuan atas pentingnya ketahanan pangan keterampilan dalam mengolah hasil alam untuk menjaga keseimbangan ketahanan pangan terutama untuk keluarga, serta akan mampu membuat sebuah pola usaha dalam pertanian yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan dapat membangun ekosistem perekonomian yang akan bermuara pada sebuah tujuan besar KRPL yakni anggota KWT Mekarsari dan masyarakat yang terlibat mampu mandiri dalam upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga. Berikut kerangka konseptual :



Gambar 2.1  
Bagan Kerangka Konseptual



Output
Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

## **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Agar mempermudah proses dalam pengumpulan data maka peneliti akan memaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 2.4.1 Bagaimana pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui kegiatan kawasan rumah pangan lestari dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya ?
- 2.4.2 Bagaimana dampak dari adanya pemberdayaan kelompok wanita tani melalui kegiatan kawasan rumah pangan lestari dalam meningkatkan pendapatan petani padi kecamatan Cipedes kota Tasikmalaya?